



Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun

Implementation of a Direct Cash Assistance Program for The Poor Communities in Urung Purba Village, Purba District, Simalungun District

Jaya Govindo Purba, Agung Suharyanto & Khairunnisah Lubis*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dilakukan di Desa Urung Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Masalah di fokuskan pada Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai, guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Edward III teori Implementasi kebijakan yang memiliki 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Data-data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Urung Purba menunjukkan hasil positif dengan komunikasi yang efektif antara perangkat desa dan penerima bantuan. Meskipun sumber daya manusia terlibat penuh dalam penyaluran, kualitasnya masih perlu perbaikan. Disposisi pelaksana yang ramah mendukung penerimaan masyarakat, dan struktur birokrasi sesuai dengan SOP. Namun, terdapat kendala seperti kekurangan tenaga pendata dan ketidakmerataan pembagian bantuan yang menimbulkan kecemburuan sosial, terutama karena sistem pendataan yang kurang optimal dan praktik oligarki. Untuk memperbaiki situasi, diperlukan peningkatan manajemen sumber daya dan reformasi sistem pendataan.

Kata kunci: Implementasi; Program Bantuan Langsung Tunai; Masyarakat Miskin

Abstract

This article or writing aims to describe the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) program which has been carried out in Urung Purba Village, Purba District, Simalungun Regency, as well as identifying inhibiting factors in its implementation. The problem focused on the Implementation of the Direct Cash Assistance Program, to approach this problem, a theoretical reference from Edward III's theory of policy implementation is used, which has 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data was collected through data collection techniques through observation, interviews, and documentation and analyzed qualitatively. This study concluded that the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) Program in Urung Purba Village showed positive results through effective communication between village officials and aid recipients. Even though human resources are fully involved in distribution, the quality still needs to be improved. The friendly disposition of implementers supports community acceptance, and the bureaucratic structure is by SOPs. However, obstacles such as a shortage of data collectors and unequal distribution of aid create social synchronization, especially due to less-than-optimal data collection systems and oligarchic practices. Improvements in resource management and data collection systems are needed to improve the situation.

Keywords: implementation; aid; poor

How to Cite: Purba, J.G., Suharyanto, A., & Lubis, K., (2024). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2) 2024: 225-232,



PENDAHULUAN

Pada Maret 2020, pandemi COVID-19 secara resmi diumumkan masuk ke Indonesia, dan sejak saat itu, penyebarannya meluas ke hampir seluruh provinsi (Alfikri et al., n.d.; Suharyanto et al., 2021; Tawai et al., 2021). Wabah ini diprediksi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak COVID-19, pemerintah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial (Daulay et al., 2023; F. R. Y. dan R. N. Putri, 2020; Raharja et al., 2022). Salah satu program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa, ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat wabah COVID-19 (Hargoro, 2023; Nugraha, 2022; Purnawan et al., 2022). Kesejahteraan tidak hanya dinilai dari aspek materi, tetapi juga dari kualitas kesehatan penduduk yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Malem et al., 2016; Marsuyetno & Harahap, 2013; S. P. Putri, 2023).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 (Dea et al., 2022; Purnawan et al., 2022; Resnu et al., 2022). Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 mengatur bahwa bantuan sosial adalah pemberian uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk melindungi dari risiko sosial (Pasi et al., 2017; Simangunsong, 2015).

Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi langkah pemerintah untuk menggantikan subsidi BBM yang dicabut dan dialihkan kepada masyarakat miskin guna mengurangi kemiskinan di Indonesia (Wati et al., 2022). Program ini, meskipun menggunakan metode manual, telah membantu pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Aplikasi ini telah berjalan dengan baik dan mendukung Badan Pusat Statistik dalam proses penerimaan BLT (Jannah et al., 2022; Koko Indra Kesuma, 2014; Rangkuti, 2012).

Di Desa Urung Purba, jumlah penerima BLT pada tahun 2020 adalah 103 orang, menurun menjadi 94 orang pada tahun 2021, dan 87 orang pada tahun 2022. Kabupaten Simalungun menerima alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp 306.916.025.000 pada tahun 2022, meningkat sekitar Rp 10 miliar dibandingkan tahun 2021. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Simalungun, Jonni Saragih, menyebutkan bahwa minimal 40 persen dari Dana Desa akan dialokasikan untuk BLT, sedangkan sisanya untuk program ketahanan pangan, penanganan COVID-19, dan sektor prioritas lainnya. Kabupaten Simalungun memiliki 386 nagori (desa) dan para kepala desa diimbau untuk menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pembatasan kegiatan ekonomi menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, yang berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin (F. R. Y. dan R. N. Putri, 2020; Raharja et al., 2022; Wijoyo & Akbar, 2021). Untuk melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berbagai kebijakan lain juga diterbitkan, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 (Hasibuan et al., 2022; Resnu et al., 2022; Setiawan et al., 2022).

Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III dalam Agustino menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses krusial. Seberapa baik suatu kebijakan dirancang, jika implementasinya tidak dipersiapkan dengan baik, tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Program BLT Dana Desa, sebagai bagian dari prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021, diharapkan dapat meminimalkan dampak ekonomi pandemi.

BLT Dana Desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk menangani dampak COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan (Hasibuan et al., 2022; Heri et al., 2020). Pemberian BLT bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki perputaran ekonomi yang terganggu akibat pandemi. BLT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi (Dauwole et al., 2017).

Menurut BPS kemiskinan diukur dari ketidakmampuan ekonomi, materi, dan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kaitan kemiskinan dengan kemampuan menjalankan fungsi sosial. Kemiskinan adalah masalah sosial yang terus ada di masyarakat (Dewi et al., 2023; Rahman, 2022). Di Desa Urung Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, kualitas SDM dan perhatian terhadap pendidikan serta kesehatan masih rendah. Terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan BLT, di mana ada penerima yang tidak layak dan beberapa yang layak tidak mendapatkan bantuan. Masyarakat juga mengeluhkan kemacetan dana dan pelayanan yang kurang memadai. Tantangan ini meliputi pendataan yang tidak akurat, kecemburuan sosial, dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur.

Kajian sebelumnya oleh Nafida Arumdani pada tahun 2020 menunjukkan bahwa efektivitas BLT Dana Desa di Desa Mojuruntut sudah sesuai dengan mekanisme, namun masih terdapat nepotisme. Penelitian Winarti Wayan pada tahun 2020 di Kabupaten Gianyar mengungkapkan kebijakan Bansos yang belum sepenuhnya efektif. Muhammad Hafiz pada tahun 2021 mencatat bahwa implementasi BLT di Kecamatan Tenayan Raya masih belum optimal. Muhammad Naufal Ardian pada tahun 2021 menilai kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan Belawan telah berjalan baik, tetapi masih ada masyarakat miskin yang belum menerima manfaat. Riski Ananda pada tahun 2021 melaporkan bahwa efektivitas BLT di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah baik meskipun terdapat kendala dalam pendataan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Desa Urung Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, serta faktor-faktor penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Urung Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari dokumen resmi serta catatan lapangan.

Subjek penelitian mencakup penerima BLT, kepala desa, dan petugas BLT. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling purposive*, yang memilih responden berdasarkan relevansi mereka. Variabel yang diukur meliputi kualitas pelaksanaan BLT dan persepsi masyarakat terhadap program tersebut.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif menurut Miles dan Huberman, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi diterapkan untuk meningkatkan validitas data. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tantangan dan efektivitas pelaksanaan BLT tanpa menggunakan model statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun

1. Komunikasi

George Edward III, Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikasi”. Komunikasi sangat memilih keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, komunikasi juga menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Implementasi yang efektif baru akan tercapai jika para penghasil keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan, Pengetahuan itu baru dapat berjalan ketika komunikasi sudah berlangsung dengan baik.

Menurut keluarga penerima BLT terkait dengan Komunikasi Perangkat Desa menyatakan bahwa: program bantuan langsung tunai ini dari perangkat desa yang mendatangi rumah langsung dan mendata identitas yang diperlukan dan dalam sosialisasi tersebut diberitahu apa itu bantuan langsung tunai, prosedur maupun syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan langsung tunai yang harus dilakukan dan apa saja kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perangkat desa dengan masyarakat penerima bantuan langsung tunai sudah terealisasi dengan baik, dapat dilihat bahwa pemerintah desa menginformasikan langsung tentang tata cara dan dokumen yang diperlukan terhadap adanya BLT dana desa ini dengan mendata sesuai dengan prosedurnya masing-masing.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya manusia sangat diperlukan guna melancarkan proses penyaluran bantuan langsung tunai di desa Urung Purba. Dalam program ini, semua staf desa terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

Tanggapan dari Kepala desa terkait dengan sumberdaya manusia yakni: semua staff atau aparatur yang berada di desa Urung Purba terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penyaluran BLT termasuk kepala dusun, yang paling penting itu adalah kasi keuangan karena dia yang ditanggung jawabkan untuk program bantuan, staf hanya membantu pendataan masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia yang terlibat dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini adalah seluruh perangkat yang ada di desa Urung Purba terkhusus Kasi Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan ini. Masih terbilang kurang dalam kualitas dikarenakan seluruh aparatur desa nya tamatan paling tinggi yaitu SMA/Sederajat.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan, dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edward III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar.

Tanggapan dari masyarakat penerima BLT terkait disposisi yakni: perangkat desa yang datang bersikap baik, sopan dan ramah pada saat memberitahu yang mendapatkan bantuan

langsung tunai, mereka mengarahkan dengan baik, dan masyarakat penerima pun merasa senang serta mendukung dengan adanya bantuan langsung tunai.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana yang ada di desa Urung Purba sudah dapat dibilang baik karena perangkat desa sudah sabar dan ramah dalam menghadapi masyarakatnya dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi implementasi serta program. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu didukung dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Dalam implementasi program bantuan langsung tunai, pemerintah Urung Purba harus membuat standar Operasional Prosedur (SOP) atau aktivitas terencana rutin dalam melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai.

Tanggapan masyarakat penerima BLT terkait dengan struktur birokrasi yakni: kepala dusun datang ke rumah untuk meminta identitas dan mendata nama penerima kemudian disuruh untuk mendatangi kantor Desa Urung Purba untuk menerima bantuan langsung tunai, masyarakat penerima juga melihat pemerintah Desa Urung Purba melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi Desa Urung Purba telah baik. Dimana dalam penyaluran bantuan langsung tunai di desa Urung Purba telah memiliki standar operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020.

Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun menghadapi sejumlah faktor penghambat yang mengurangi efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor ini meliputi masalah dalam sumber daya dan dana, serta disposisi dan sistem yang berpengaruh pada distribusi bantuan.

1. Sumber Daya dan Dana

Salah satu tantangan utama dalam implementasi BLT di Desa Urung Purba adalah kurangnya sumber daya manusia. Pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan seringkali terhambat karena keterbatasan tenaga pendata. Proses pengumpulan data yang seharusnya dilakukan dengan cepat dan efisien menjadi terhambat akibat kekurangan anggota di lapangan. Keterbatasan ini membuat pendataan menjadi tidak efektif, dan berakibat pada keterlambatan dalam penyaluran bantuan.

Menurut narasumber, perangkat desa mengalami kesulitan dalam mendatangi setiap rumah untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Kepala dusun dan perangkat desa harus mengunjungi rumah-rumah warga secara langsung untuk memastikan identitas dan kelayakan mereka menerima bantuan. Hal ini sering kali menimbulkan kelelahan dan menyebabkan proses pendataan menjadi lambat. Dalam usaha untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia, kepala desa Urung Purba berupaya bekerja sama dengan tokoh masyarakat di setiap dusun. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat pengumpulan data dan meningkatkan keefektifan proses penyaluran bantuan.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tantangan dalam hal sumber daya manusia masih belum sepenuhnya teratasi. Sumber daya manusia yang tersedia masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pendataan yang efektif. Upaya perbaikan yang dilakukan, seperti melibatkan tokoh masyarakat,

menunjukkan bahwa masalah ini kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendataan.

2. Disposisi

Faktor disposisi juga berperan signifikan dalam menghambat implementasi BLT di Desa Urung Purba. Disposisi mencakup sikap, komitmen, dan keinginan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program. Ketidakmerataan dalam pembagian bantuan sering menyebabkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Masalah ini seringkali timbul akibat sistem pendataan yang belum optimal dan adanya praktik oligarki atau kekeluargaan yang mempengaruhi distribusi bantuan.

Menurut narasumber, meskipun perangkat desa bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mengelola distribusi BLT, terdapat keluhan dari masyarakat mengenai ketidakadilan dalam pembagian bantuan. Beberapa warga merasa tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima karena adanya faktor kekeluargaan atau konflik dengan tokoh masyarakat yang diutus. Ketidakmerataan ini sering kali dipicu oleh sistem oligarki, di mana hubungan kekeluargaan atau kedekatan personal mempengaruhi keputusan distribusi bantuan.

Tanggapan dari masyarakat mengindikasikan bahwa ketidakmerataan dalam penyaluran BLT disebabkan oleh sistem pendataan yang belum maksimal. Beberapa masyarakat yang lebih layak menerima bantuan tidak mendapatkan bagian mereka karena adanya praktik oligarki yang memprioritaskan keluarga atau kenalan tokoh masyarakat. Situasi ini menciptakan ketidakpuasan dan mengurangi efektivitas program BLT dalam mencapai tujuannya.

Faktor penghambat dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Urung Purba melibatkan dua aspek utama: sumber daya dan disposisi. Kurangnya sumber daya manusia mempengaruhi efektivitas pendataan dan penyaluran bantuan, sementara disposisi dan sistem kekeluargaan berkontribusi pada ketidakmerataan pembagian bantuan. Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya peningkatan dalam manajemen sumber daya manusia dan reformasi sistem pendataan serta distribusi. Kerja sama yang lebih baik antara perangkat desa dan tokoh masyarakat, bersama dengan pengembangan prosedur yang lebih transparan dan adil, diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan program BLT dan mengurangi ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

SIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Urung Purba menunjukkan hasil positif. Komunikasi antara perangkat desa dan penerima bantuan efektif, dengan informasi yang jelas mengenai prosedur dan dokumen. Sumber daya manusia terlibat penuh dalam penyaluran, meskipun kualitas masih perlu peningkatan. Disposisi pelaksana kebijakan baik, dengan sikap ramah dan sopan, mendukung penerimaan positif masyarakat. Struktur birokrasi sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, memastikan koordinasi dan pelaksanaan program berjalan baik. Secara keseluruhan, program BLT di desa ini berhasil dengan komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi yang mendukung.

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Urung Purba menghadapi beberapa kendala signifikan. Sumber daya dan dana menjadi masalah utama, di mana kekurangan tenaga pendata dan kewalahan dalam proses pengumpulan data menghambat efektivitas pendataan. Upaya perbaikan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Disposisi juga merupakan faktor penghambat, dengan ketidakmerataan pembagian bantuan yang menimbulkan kecemburuan sosial. Ketidakadilan ini dipicu oleh sistem pendataan yang tidak optimal dan adanya praktik oligarki. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam manajemen sumber daya dan reformasi dalam sistem pendataan untuk mengatasi ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

REFERENCES

- Alfikri, M., Sumanti, S. T., Rasyid, A., Azhar, A. A., Abidin, S., & Suharyanto, A. (n.d.). *An Effects of Social Media on High School Students during the Covid-19 in Indonesia*.
- Daulay, A. L., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2023). Analisis Yuridis Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dari Perbankan Pada KPKNL Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2982–2992. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1727>
- Dauwole, E., Kaawoan, J., & Sendow, Y. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *PERSPEKTIF*, 2(2), 1–11.
- Dea, S., Ginting, A., Suharyanto, A., & Batubara, B. M. (2022). Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinam Kabupaten Dairi. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1183>
- Dewi, Y., Hartono, B., & Adam, A. (2023). Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3009–3021. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1692>
- Hargoro, A. G. (2023). Implementasi Perbup Kediri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui SISKEUDES di Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 88–98. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v5i1.1624>
- Hasibuan, G. J. W., Badaruddin, B., & Kusmanto, H. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Deli Muda Hulu Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Perspektif*, 11(3), 1181–1193. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6469>
- Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190–203.
- Jannah, N., Muda, I., & Jamil, B. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) Implementation of Education Family Pogram (PKH) Policy in The Field of Education (Case Study in the Urban Village of . *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.774>
- Koko Indra Kesuma. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 71–85. <https://doi.org/10.31289/jap.v4i1.1362>
- Malem, S., Dewi, R., & Lubis, A. (2016). Peranan Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam dalam Meraih Adipura. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1).
- Marsuyetno, & Harahap, R. H. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), 271–292. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1349>
- Nugraha, D. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 304–313. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1202>
- Pasi, N., Kadir, A., Hukum, F., & Area, U. M. (2017). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi Implementation of Regional Management Information System Accrual Based to Dairi District Government Sistem Informasi Manajem. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(13), 49–63.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Putri, F. R. Y. dan R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 386.
- Putri, S. P. (2023). Peran Smart City dalam Menentukan Pergerakan Penduduk Kota Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2160–2173. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1623>
- Raharja, S. J., Muhyi, H. A., & Tahir, R. (2022). Analisis Kebijakan dalam Penanganan Dampak Risiko Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Bandung Jawa Barat, Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1514–1526. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.904>

- Rahman, F. (2022). Analisis Prediksi Finansial Distress dengan Metode Altman Z-Score dan Springate Sebelum dan Selama Covid- 19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1000>
- Rangkuti, S. (2012). Efetifitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Deli Serdang Studi Kasus Di Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(2), 287–318.
- Resnu, W., Yuniningsih, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pematang. *Perspektif*, 11(3), 1070–1076. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6277>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718–734. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Simangunsong, F. (2015). Kajian Penggalan Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 37–49.
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y. A. (2021). School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil*.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., De Guzman, B. M. N., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 286–301. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3758>
- Wati, H., Muda, I., & Nasution, I. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 1(2), 63–70. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.782>
- Wijoyo, H., & Akbar, I. R. (2021). Strategi Usaha Menengah Kecil Dan Mikro Bertahan Di Era Pandemi-19. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 40–46. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.11>